



# PENYUSUNAN STRATEGI MILITER DALAM SISTEM PERTAHANAN SEMESTA: TANGGAPAN TERHADAP GASASAN TENTANG SPMI SEBAGAI STRATEGI PERTAHANAN NEGARA KEPULAUAN



Oleh:  
Letkol Art Sisriadi

## PENDAHULUAN

1. Setiap jengkal tanah dan air Indonesia beserta udara di atasnya adalah wilayah Indonesia yang berdaulat. TNI sebagai penegak kedaulatan bertanggung jawab untuk melindungi dan mempertahankannya dari segala bentuk ancaman, termasuk ancaman militer. Tanggung jawab tersebut mewajibkan TNI untuk melihat kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai landasan dalam menyusun strategi militer nasional.



Ditinjau dari aspek geografi, negara Indonesia yang memiliki wilayah lautan lebih luas dari wilayah daratan sudah selayaknya memerlukan kekuatan militer matra laut yang dapat diandalkan untuk menangkal setiap upaya musuh yang bermaksud mengganggu atau mengancam kedaulatan negara. Namun demikian faktor geografis tidak boleh dilihat sebagai satu-satunya faktor fundamental dalam menyusun strategi militer. Masih banyak faktor lain yang harus menjadi pertimbangan, antara lain adalah faktor ancaman. Bentuk-bentuk ancaman berada dalam satu spektrum yang bergerak dari ancaman berskala rendah sampai dengan ancaman yang paling membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Salah satu bentuk ancaman yang mungkin digunakan oleh pihak musuh adalah invasi dengan penggunaan kekuatan militer.

2. Dalam rangka penggunaan kekuatan militer, musuh akan berupaya untuk mencapai *Strategic End-State* dengan menghancurkan atau menguasai *Center Of Gravity*. Menurut Clausewitz, "*Centers of Gravity are the characteristics, capabilities or locations, from which a military force derives freedom of action, physical strength or will to fight*".<sup>1</sup> Dengan memahami konsep tersebut, anggapan bahwa kegagalan pertahanan maritim yang mengedepankan kekuatan laut dan udara akan berpengaruh besar terhadap pertahanan Indonesia secara keseluruhan perlu ditinjau kembali. Pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah:

- Mungkinkah musuh akan menjadikan lautan Indonesia sebagai *center of gravity*?
- Mampukah satu atau beberapa negara musuh yang menggabungkan kekuatan militernya menguasai seluruh wilayah lautan Indonesia?
- Kalau benar mereka mampu, apakah berarti bahwa TNI tidak lagi memiliki *freedom of action*?
- Apakah konsep *national subjugation* dikenal dalam sistem pertahanan negara Indonesia?<sup>2</sup>

Makalah ini disusun sebagai wujud apresiasi yang tinggi terhadap konsep SPMI. Pembahasan yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan TNI AD dalam makalah ini lebih dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang ke-khas-an matra

darat dalam sistem pertahanan semesta, agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan konsep penggunaan kekuatan TNI AD, TNI AL dan TNI AU untuk diabdikan kepada kepentingan bangsa dan negara.

## HAKEKAT ANCAMAN

3. Sun Tzu mengatakan "*Ketahuilah musuhmu dan kekuatanmu sendiri, maka dalam seratus kali pertempuran kamu tidak akan terkalahkan. Jika mengetahui kekuatan sendiri tetapi mengabaikan musuh, peluang antara menang dan kalah adalah sama. Jika mengabaikan keduanya kekalahan akan menghadang dalam setiap pertempuran*". Kata-kata tersebut hampir diakui sebagai satu aksioma oleh para pakar strategi di seluruh dunia. Oleh karena itu dalam merumuskan strategi pertahanan maupun strategi militer nasional, negara manapun selalu menempatkan ancaman sebagai pertimbangan utama.

### 4. Persepsi Ancaman.

Dalam era globalisasi, perebutan kepentingan antar negara menjadi semakin kompleks. Negara-negara maju menjadi semakin dominan dalam kancha perebutan kepentingan tersebut. Kondisi ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan negara-negara berkembang, bahkan dapat berubah menjadi ancaman manakala perebutan kepentingan tersebut berkembang menjadi konflik. Konflik tersebut dapat berupa konflik antara bangsa atau konflik internal bangsa yang sengaja "diciptakan" oleh suatu bangsa yang bertujuan melemahkan bangsa lain.

#### 4.a. Konflik Antar Bangsa.

Negara maju yang kuat tetap berupaya mempertahankan superioritasnya terhadap negara-negara di dunia. Semakin menipisnya cadangan sumber daya alam yang mereka miliki dan kemajuan yang dicapai oleh negara-negara berkembang di masa mendatang dapat dianggap sebagai potensi ancaman terhadap superioritasnya. Kondisi ini mendorong mereka untuk menguasai sumber daya alam dunia dan memaksakan kebijakan politik global yang menguntungkan mereka.



Supremasi negara kuat di bidang ekonomi, iptek dan militer telah dijadikan sebagai alat penekan terhadap negara berkembang dengan memanfaatkan isu global seperti demokratisasi, HAM, lingkungan hidup dan terorisme internasional yang sengaja diciptakan sebagai sistem nilai universal dan harus dipatuhi oleh semua negara. Fenomena ini pada hakekatnya merupakan sebuah konsep “perang modern” yang digunakan untuk melakukan penjajahan baru dalam rangka mempertahankan superioritas negara-negara maju.

Permasalahan status teritorial perbatasan antar negara, pelanggaran wilayah, penguasaan sumber daya alam dan intervensi negara asing terhadap persoalan dalam negeri suatu negara serta ancaman jaringan terorisme internasional yang menyusup kedalam suatu negara dapat menjadi faktor pendorong terjadinya konflik antar bangsa.

Berbagai bentuk konflik antar bangsa tersebut merupakan potensi ancaman bagi negara Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki potensi sumber daya alam. Potensi ancaman juga dapat timbul karena kondisi negara Indonesia yang berbatasan dengan beberapa negara lain baik di wilayah daratan maupun lautan.

**4.b. Konflik Internal Bangsa.**

Kemajemukan bangsa Indonesia merupakan potensi konflik yang besar bila masyarakat telah kehilangan nasionalisme dan wawasan kebangsaan. Dalam masyarakat yang majemuk, nasionalisme dan wawasan kebangsaan sangat diperlukan karena dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara selalu terjadi interaksi antar kelompok masyarakat. Manakala setiap kelompok tidak mampu mengedepankan kepentingan bangsa, potensi konflik tersebut dapat berkembang menjadi konflik terbuka yang akan mengancam integritas bangsa. Kecenderungan konflik internal dapat dibedakan menjadi konflik vertikal yang berbasis ideologi, politik dan ekonomi dan konflik horisontal yang berbasis suku, agama, antar golongan, budaya dan kesenjangan sosial.

**5. Bentuk Ancaman.**

Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan



yang membahayakan kemerdekaan, kedaulatan bangsa, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Bentuk-bentuk ancaman dapat berbentuk:

**5.a. Ancaman Keamanan Tradisional.**

Ancaman keamanan tradisional dilakukan oleh negara lain dengan menggunakan kekuatan militer dapat berbentuk:

5.a.1) Invasi militer yang bertujuan untuk menguasai seluruh atau sebagian wilayah Indonesia, baik yang dilakukan secara unilateral maupun multinasional.

5.a.2) Serangan militer terbatas (misalnya serangan udara) terhadap instalasi pemerintah maupun obyek vital nasional dalam rangka melumpuhkan kegiatan pemerintahan.

5.a.3) Serangan militer terbatas terhadap kekuatan militer yang sangat vital bagi penyelenggaraan operasi TNI.

5.a.4) Kehadiran kekuatan bersenjata asing secara tidak sah di wilayah kedaulatan Indonesia yang bertentangan dengan ketentuan internasional maupun persetujuan bilateral atau multilateral.

5.a.5) Kegiatan intelijen negara asing yang bertujuan menciptakan kondisi yang kondusif untuk melakukan operasi militer di Indonesia, misalnya:

- Infiltrasi dan spionase untuk menciptakan instabilitas keamanan nasional.
- Sabotase terhadap instalasi penting pemerintah dan obyek vital nasional.
- Aksi teror yang dilakukan kelompok bersenjata





atau tentara bayaran.

#### 5.b. Ancaman Keamanan Non-tradisional.

Ancaman keamanan non-tradisional yang timbul di dalam negeri dapat berbentuk:

5.b.1) Pemberontakan bersenjata untuk melawan pemerintahan yang sah.

5.b.2) Gerakan separatis bersenjata yang bermaksud memisahkan diri dari NKRI.

5.b.3) Sabotase yang dilakukan oleh kelompok tertentu terhadap instalasi penting dan obyek vital nasional yang bertujuan untuk menciptakan rasa takut dalam masyarakat serta menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

5.b.4) Aksi teror yang dilakukan oleh kelompok bersenjata dalam negeri yang melakukan *link-up* dengan jaringan terorisme internasional.

5.b.5) Konflik horisontal yang terjadi antar kelompok masyarakat dengan menggunakan kekerasan.

5.b.6) Penyelundupan senjata, munisi dan bahan peledak dan bahan lain yang membahayakan melalui daerah perbatasan.

5.b.7) Gangguan keamanan laut berupa perompakan, pencurian ikan dan sumber daya laut lainnya.

5.b.8) Gangguan keamanan udara seperti pembajakan, pelanggaran wilayah udara dan terorisme melalui sarana transportasi udara.

5.b.9) Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain untuk merongrong kewibawaan

pemerintah di mata internasional.

## ASPEK GEOGRAFI DALAM PERTAHANAN NEGARA

6. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki karakteristik geografis yang sangat unik bila ditinjau dari sudut pandang pertahanan negara. Keunikan tersebut nampak karena negara Indonesia terbentuk dari gugusan kepulauan yang terdiri dari rangkaian pulau besar dan pulau-pulau kecil. Keunikan lainnya adalah bahwa luas lautan Indonesia sangat dominan dibandingkan dengan luas daratan. Oleh karena itu, lautan Indonesia dapat dipandang sebagai medan tempur sekaligus sebagai rintangan alam bagi musuh yang akan melakukan pendudukan ke wilayah daratan.

### 7. Pulau-Pulau Besar.

Pulau-pulau besar memiliki nilai strategis yang berbeda-beda ditinjau dari aspek pertahanan negara. Perbedaan nilai strategis tersebut disebabkan oleh karakteristik yang berbeda-beda sesuai kondisi geografi, demografi dan kondisi sosial yang terkandung di bawah dan di permukaannya. Oleh karena itu penyiapan dan pemanfaatan pulau-pulau besar dalam rangka pertahanan negara juga berbeda-beda.

Dalam konteks pertahanan matra darat, penggelaran Kodam sebagai kompartemen strategis pertahanan negara disesuaikan dengan karakteristik dan nilai strategis pulau-pulau besar. Misalnya Pulau Sulawesi secara keseluruhannya merupakan satu kompartemen strategis, tetapi Pulau Sumatra dan Pulau Jawa dibagi-bagi menjadi beberapa Kompartemen Strategis. Setiap Kompartemen Strategis diharapkan memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan perlawanan dalam perang berlarut (*protracted war*) secara mandiri, mulai dari tindakan perlawanan awal dalam bentuk operasi militer konvensional sampai dengan perang gerilya ketika musuh telah menguasai sebagian besar wilayah kompartemen strategis.

Penyelenggaraan perlawanan dalam perang berlarut, Kompartemen Strategis disusun dalam Rencana Kampanye dan Rencana Operasi Kodam. Dalam penyusunan kedua dokumen tersebut,



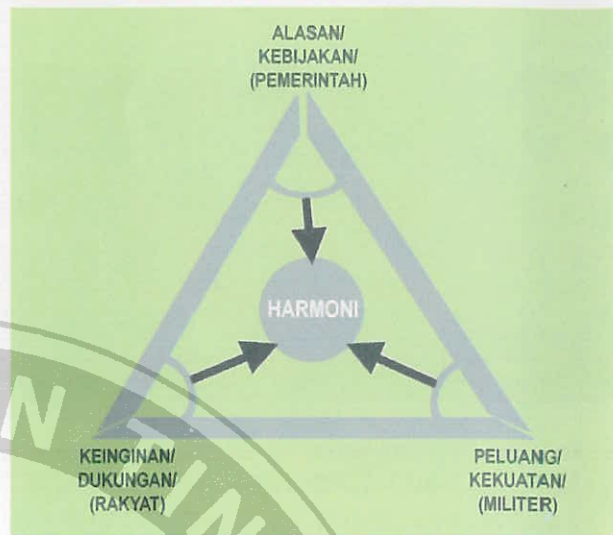
Kodam mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan perang berlarut. Salah satu faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kampanye dan Rencana Operasi Kodam adalah kondisi wilayah laut dan pulau-pulau kecil yang mengelilingi wilayah daratan. Dalam Rencana Kampanye dan Rencana Operasi Kodam, wilayah laut dan pulau-pulau kecil yang mengelilingi pulau besar dipandang sebagai daerah depan, jalur komunikasi (*line of communication*) atau daerah belakang sesuai dengan konfigurasi medan dan prediksi arah datangnya musuh serta pentahapan operasi.

Kompartementasi strategis wilayah pertahanan negara mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan kondisi sosial yang bersifat dinamis. Oleh karena itu TNI AD selalu mengkaji berbagai kemungkinan untuk melakukan pengembangan kekuatan berdasarkan penilaian aspek strategis wilayah. Dalam penyusunan rencana pengembangan kekuatan TNI AD yang berkaitan dengan pembentukan Kodam, wilayah laut yang mengelilingi pulau-pulau besar juga menjadi faktor pertimbangan yang sangat penting.

**8. Rangkaian Pulau-Pulau Kecil.**

Rangkaian pulau-pulau kecil memiliki karakteristik yang berbeda dengan pulau-pulau besar, terutama ditinjau dari konstelasi geografisnya. Perbedaan tersebut berimplikasi pada kompartementasi wilayah strategis, pada gilirannya berimplikasi pada penyusunan konsep pertahanan dan penggelaran kekuatan TNI AD sebagai penyelenggara perlawanan wilayah daratan.

Wilayah lautan di rangkaian pulau-pulau kecil bersifat dominan, sedangkan pulau-pulau kecil dipandang sebagai titik-titik kuat perlawanan. Dominasi wilayah lautan di rangkaian pulau-pulau kecil memiliki peran yang sangat penting sebagai jalur komunikasi antara titik kuat yang satu dengan titik kuat yang lain. Wilayah laut yang mengelilingi pulau-pulau kecil juga dapat dipandang sebagai daerah depan pertahanan di titik kuat berdasarkan prediksi arah datangnya musuh.



Gambar-1  
Teori Trinitas dari Clausewitz

Penyelenggaraan perlawanan dalam perang berlarut di rangkaian pulau-pulau kecil dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di darat maupun sumber daya kelautan, baik sumber daya alam maupun sumber daya buatan (misalnya sarana transportasi laut). Dalam hal ini pengintegrasian konsep pertahanan wilayah darat dengan konsep pertahanan wilayah laut menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan perlawanan dalam perang berlarut di rangkaian pulau-pulau kecil.

**SISTIM PERTAHANAN SEMESTA SEBAGAI STRATEGI PERTAHANAN NEGARA**

9. Masyarakat dunia menjadi saksi keberhasilan invasi militer Amerika Serikat ke Irak beberapa tahun lalu. Kondisi ini juga dapat dipandang dari sudut berlawanan, yaitu hancurnya sistem pertahanan negara Irak oleh kekuatan militer Amerika Serikat. Dari sudut pandang tersebut, masyarakat dunia melihat betapa sistem pertahanan Irak yang didukung oleh kekuatan teknologi militer dengan mudah dihancurkan oleh kekuatan militer Amerika Serikat. Disisi lain, masyarakat dunia juga disuguhi sebuah “drama kolosal” yang memerankan rakyat Irak sebagai “penonton” kehancuran kekuatan militernya tanpa merasa kehilangan harga diri sebagai bangsa berdaulat dan berbudaya tinggi. Ilustrasi tersebut



adalah sebuah contoh nyata bahwa suatu sistem pertahanan yang tidak didukung oleh rakyat tidak akan mampu menopang kedaulatan negara.

**10. Tinjauan Teoritis.** Konsep Sistem Pertahanan Semesta merupakan sebuah konsep pertahanan yang memiliki kesamaan dengan konsep “Trinitas” yang diperkenalkan oleh Clausewitz dalam buku *On War*. Dalam teorinya, Clausewitz mengatakan bahwa keunggulan dalam perang ditentukan oleh tiga hal yaitu kekuatan alamiah yang berkaitan dengan dukungan rakyat, peluang yang berkaitan dengan komandan dan militer, serta subordinasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pemerintah.<sup>3</sup> Dari gambar-1 dapat dilihat bahwa ketiga unsur saling tarik-menarik. Keunggulan akan dicapai manakala hubungan antara ketiga unsur berlangsung secara harmonis. Sistem pertahanan semesta dapat dilihat sebagai analogi teori Trinitas tersebut, bahkan ikatan Rakyat dalam segitiga Rakyat-TNI-Pemerintah mempunyai kualitas yang lebih kuat yang ditunjukkan dalam keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan perlawanan terhadap musuh. Jadi, rakyat tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi kalau perlu mendukung secara fisik.

Keikutsertaan rakyat dalam upaya pertahanan negara akan mempersulit upaya musuh untuk menghancurkan *center of gravity* bangsa kita. Karena *center of gravity* dalam sistem pertahanan semesta adalah rakyat Indonesia yang manunggal dengan TNI. Bukan pemerintah atau kekuatan militer semata. Manakala TNI mulai meninggalkan rakyat dan membanggakan kekuatan teknologi militernya, maka “drama kolosal” yang pernah berlangsung di Irak beberapa tahun lalu dapat pula “dimainkan” di Indonesia oleh negara-negara besar guna mendapatkan kepentingannya.

**11. Tinjauan Empiris.** Bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa keikutsertaan rakyat dalam sistem pertahanan negara mampu mempertahankan kemerdekaan meski kekuatan militer musuh memiliki keunggulan daya tempur relatif. Sejarah mencatat pada awal kemerdekaan RI, Belanda membonceng tentara Sekutu untuk melakukan agresi militernya. Kekuatan militer RI

tidak sebanding dengan kekuatan militer Sekutu-Belanda, sehingga dalam waktu singkat kekuatan militer RI telah tercerai-berai. Namun perlawanan terhadap kekuatan militer Sekutu-Belanda masih terus dilanjutkan berkat keikutsertaan rakyat, sehingga pada akhirnya Belanda mau mengakui kedaulatan RI melalui meja perundingan.

Keikutsertaan rakyat dalam perang berlarut juga telah dipraktekkan oleh negara lain dengan berhasil, misalnya oleh Cina ketika melawan Jepang dari tahun 1939-1945. Tentara Jepang yang dilengkapi dengan teknologi militer canggih pada saat itu tidak mampu mengalahkan semangat perlawanan rakyat Cina. Walaupun tentara Cina saat itu sangat kecil, namun berkat dukungan sebagian besar rakyat, mereka mampu melancarkan perlawanan dalam perang berlarut yang melelahkan tentara Jepang. Bahkan tentara Jepang harus merelakan persenjataan canggihnya dilucuti oleh gerilyawan Cina pada saat perang berakhir.<sup>4</sup>

Metode perang berlarut juga dipraktekkan oleh Vietnam. Selama 2 dekade tentara Amerika Serikat merasakan betapa sulitnya mengalahkan Tentara Sosialis Vietnam yang didukung gerilyawan Viet Cong. Teknologi militer yang canggih ternyata tidak mampu mengangkat mereka dari “neraka” yang diciptakan oleh menyatunya kekuatan militer reguler Tentara Sosialis Vietnam dengan gerilyawan Viet Cong yang dibentuk dari rakyat.<sup>5</sup>

## 12. Implementasi Sistem Pertahanan Semesta.

Sistem Pertahanan Semesta adalah sistem pertahanan negara yang mengikutsertakan seluruh rakyat dan sumber daya nasional dalam upaya pertahanan negara dalam rangka menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan negara serta keutuhan wilayah NKRI. Dalam penyelenggaraan sistem pertahanan semesta dikenal beberapa tahapan sebagai berikut:

**12.a.** Tahap penangkalan, yaitu upaya menghilangkan kemauan musuh/ bakal musuh untuk melakukan agresinya. Penangkalan dilakukan dengan pembangunan dan penggelaran kekuatan militer, melakukan kerja sama militer antar negara atau melakukan diplomasi militer.



12.b. Tahap penghambatan, yaitu upaya untuk menghambat musuh yang akan melancarkan aksi militernya sebelum musuh memasuki wilayah Indonesia. Pada tahap ini, peran kekuatan TNI AL dan TNI AU sangat dominan tergantung jalan pendekat yang digunakan oleh musuh dalam melancarkan agresinya.

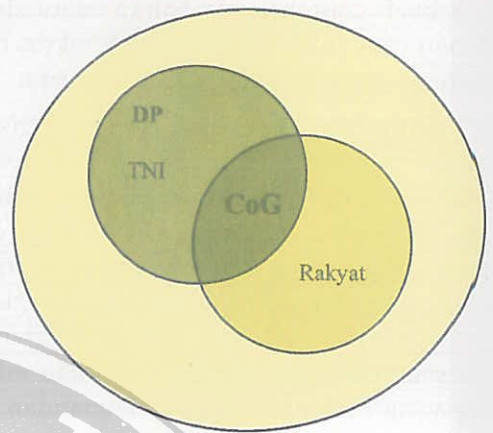
12.c. Tahap perlawanan konvensional, yaitu upaya penggunaan kekuatan TNI AL, TNI AU dan TNI AD untuk melakukan perlawanan secara konvensional terhadap kekuatan militer musuh yang telah memasuki ke sebagian atau seluruh wilayah Indonesia.

12.d. Tahap perlawanan berlarut, yaitu upaya perlawanan yang dilakukan untuk melemahkan kekuatan musuh dengan menggunakan taktik gerilya. Pada tahap ini, keikutsertaan rakyat dalam kegiatan perlawanan akan menjadi kunci keberhasilan.

12.e. Tahap serangan balas, yaitu tahap penghancuran kekuatan militer musuh manakala perbandingan daya tempur relatif telah menguntungkan kekuatan militer sendiri.

Dalam mengimplementasikan Sistem Pertahanan Semesta, dukungan rakyat merupakan *Center of Gravity* (CoG) karena dukungan rakyat adalah pusat kekuatan perlawanan yang sebenarnya. Hilangnya dukungan rakyat akan mengakhiri seluruh upaya perlawanan dalam perang berlarut, yang berarti pula akan mengakhiri eksistensi bangsa Indonesia. Dalam konteks Sistem Pertahanan Semesta, TNI (AD, AL dan AU) bukan merupakan *Center of Gravity* tetapi hanya sebagai *Decisive Points* (DP).<sup>6</sup> Hubungan antara *Decisive Point* dengan *Center of Gravity* dapat dilihat pada gambar-2.

Dengan memahami konsep *Center of Gravity* dari Clausewitz serta pentahapan yang berlaku dalam Sistem Pertahanan Semesta, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kekuatan militer bukan satu-satunya penentu keberhasilan pertahanan negara. Keberhasilan sistem pertahanan negara sangat ditentukan oleh dukungan rakyat terhadap tugas-tugas TNI pada masa damai serta keikutsertaan rakyat dalam perlawanan perang berlarut.



Gambar-2

### PENYUSUNAN STRATEGI MILITER TNI

13. Ada satu perbedaan mendasar antara strategi militer dengan strategi organisasi yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*). Strategi militer mengalir dari atas ke bawah saja (*top-down*). Sedangkan penyusunan strategi organisasi yang *profit oriented*, dapat mengalir dari bawah ke atas (*bottom-up*) atau sebaliknya (*top-down*). Dalam organisasi berorientasi keuntungan, strategi utama perusahaan dapat dipandang secara makro sebagai kompilasi dari strategi anak perusahaan atau perusahaan-perusahaan lain yang tergabung dalam satu konsorsium.

Strategi militer mengalir dari atas ke bawah, karena organisasi militer memiliki karakteristik yang khas, yang salah satunya adalah hirarkhi komando yang sangat tegas. Oleh karena itu, strategi organisasi militer yang lebih besar harus memberikan panduan (*guidance*) bagi organisasi bawahannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks ini, strategi pertahanan negara tidak boleh dilihat sebagai kompilasi strategi militer ataupun konsep-konsep angkatan.

### 14. Tataran dan Kewenangan Penyusunan Strategi di Bidang Pertahanan.

Tataran kewenangan penyusunan strategi di bidang pertahanan, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan militer, seyogyanya disesuaikan dengan tingkat-tingkat perang (*level of war*). Pemahaman tentang tingkat-tingkat perang akan mengantarkan pada pemahaman



tentang kerangka kerja (*framework*) masing-masing tingkat, selanjutnya dapat menyusun konsep-konsep penggunaan kekuatan militer pada masing-masing tingkat. Walaupun tidak ada batas yang tegas, namun tingkat-tingkat perang dapat dikategorikan dalam **tingkat strategis**, **tingkat operasional** dan **tingkat taktis** (gambar-3)<sup>7</sup>. Pada perencanaan perang tingkat strategis, suatu negara akan menentukan sasaran-sasaran strategis dan kebijakan untuk menggunakan sumber daya nasional guna mencapai sasaran strategis. Wewenang penyusunan kebijakan pada tingkat ini berada pada pemegang komando tingkat nasional, mulai dari Presiden, sampai dengan Panglima Komando Gabungan tertinggi. Perencanaan perang tingkat operasional adalah tataran perang yang menghubungkan penggunaan satuan-satuan taktis dalam mencapai sasaran-sasaran strategis. Titik berat perhatian pada tingkat ini adalah pada pengorganisasian dan pengintegrasian kampanye dan operasi-operasi besar. Wewenang penyusunan rencana perang pada tingkat ini berada pada pemimpin komando utama operasional. Taktik adalah penggunaan satuan dalam pertempuran. Oleh karena itu perencanaan perang pada tingkat ini mencakup pengaturan urutan satuan dalam manuver satuan yang lebih besar untuk dihadapkan pada kekuatan musuh. Mengalir dari pemahaman tentang tingkat-tingkat perang, penyusunan strategi di bidang pertahanan dapat



Gambar-3  
Visualisasi Tingkat-tingkat Perang



Gambar-4  
Tataran kewenangan penyusunan strategi di bidang pertahanan

digambarkan seperti pada gambar-4.

#### 14.a. Strategi Pertahanan Negara.

Strategi pertahanan negara merupakan strategi raya (*grand strategy*), adalah seni dan ilmu tentang pembangunan, penggunaan dan pengkoordinasian instrumen kekuatan negara (Diplomasi, Ekonomi, Militer dan Informasi) untuk mencapai sasaran-sasaran yang akan mendukung terciptanya keamanan nasional.<sup>8</sup> Perumusan tujuan dalam strategi pertahanan negara mengacu pada tujuan nasional, serta menjadi pedoman dalam penyusunan strategi militer.

Departemen Pertahanan RI telah merumuskan strategi pertahanan negara yang tertuang dalam Buku Putih Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberi judul "Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21". Sebagai sebuah konsep strategi, buku tersebut secara implisit menjelaskan tujuan (*end-state*), sarana untuk mencapai tujuan (*means*) serta mekanisme pencapaian tujuan (*ways*). Sebagai strategi pertahanan negara, Buku Putih Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengakomodasi sistem pertahanan semesta seperti yang diamanatkan dalam UU nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

#### 14.b. Strategi Militer Nasional.

Strategi Militer Nasional adalah seni dan ilmu tentang pendistribusian dan penggunaan



kekuatan militer dalam rangka mencapai tujuan nasional baik pada masa damai maupun masa perang.<sup>9</sup> Strategi Militer Nasional merupakan penjabaran dari Strategi Pertahanan Negara secara lebih spesifik berkaitan dengan penggunaan kekuatan militer. Sebagai bahan banding, di Amerika Serikat strategi militer nasional disusun oleh staf gabungan dan diberi judul “*A Strategy for Today; A Vision for Tomorrow*”.

Dalam konteks strategi militer Indonesia, Mabes TNI sebagai komando gabungan tertinggi menyusun strategi militer dalam bentuk Rencana Strategis TNI. Rencana strategis tersebut berisi kebijakan Mabes TNI tentang pembangunan dan proyeksi penggunaan kekuatan TNI baik pada masa damai maupun perang. Dokumen ini merupakan petunjuk bagi Mabes Angkatan dalam menyiapkan kemampuan angkatan masing-masing untuk mendukung tugas pokok TNI.

**14.c. Rencana Kampanye Militer.**

Rencana kampanye militer gabungan merupakan rencana strategis yang berisi tugas pokok dan tugas-tugas Komando Mandala Operasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Strategi Militer Nasional. Sebagai gambaran, Amerika Serikat yang memiliki 5 (lima) Komando Mandala Operasi (COCOM) yang tersebar di seluruh dunia.<sup>10</sup>

Dalam konteks Indonesia, dokumen ini seyogyanya disusun oleh Mabes TNI dalam bentuk Rencana Kampanye TNI yang memberikan tugas pokok dan tugas-tugas kepada Komando Operasional Utama TNI. Rencana Kampanye Militer ini disusun berdasarkan rencana strategis TNI dan strategi pertahanan negara serta menjadi pedoman dalam penyusunan konsep-konsep operasional dan taktis dibawahnya.

**15. Tinjauan Terhadap SPMI Sebagai Strategi Pertahanan Negara.**

Konsep yang diajukan dalam makalah “Gagasan Tentang Strategi Pertahanan Maritim Indonesia Sebagai Strategi Pertahanan Negara Kepulauan” perlu ditinjau kembali karena beberapa hal sebagai berikut:

**15.a.** Stratifikasi strategi yang ditawarkan dalam makalah tersebut meletakkan Strategi Pertahanan Maritim Indonesia sebagai Sub-strategi

Militer Indonesia. Hal ini mengandung pengertian bahwa Strategi Militer Indonesia dibagi-bagi menjadi beberapa sub-strategi militer sesuai dengan karakteristik kematraan. Dengan demikian wewenang Mabes TNI sebagai Komando Militer Gabungan Tertinggi TNI menjadi terbatas, yaitu sebagai koordinator (*orchestrator?*) penyelenggaraan sub-sub strategi kematraan. Pembagian Strategi Militer Indonesia dalam beberapa sub-strategi Militer sesuai kematraan juga akan meminimalkan efektivitas pengerahan kekuatan TNI dalam konteks gabungan. Hal ini justru akan mengakibatkan terabaikannya prinsip “**Kesatuan Komando**”, karena pengerahan kekuatan matra akan semakin independen. Padahal pemenuhan prinsip kesatuan komando (*Unity of Command*) akan mengarah pada tercapainya penyatuan tindakan (*Unified Actions*). *Unified actions* mengandung pengertian bahwa bentuk tindakan boleh berbeda-beda, karena setiap matra memiliki karakteristik berbeda, namun harus diarahkan pada satu tujuan (*end-state*) yang sama.

**15.b.** Dalam perumusan strategi militer, sistem pertahanan Indonesia menganut “**Defensif Aktif**” yang lebih mengedepankan nuansa defensif namun tidak menutup kemungkinan pengambilan inisiatif. Asas Defensif Aktif yang ditawarkan dalam SPMI sebenarnya tidak dikenal dalam sistem pertahanan negara. Asas-asas yang digunakan adalah asas-asas perang universal dan asas-asas pertahanan semesta. Salah satu asas perang universal yang digunakan dalam pengerahan kekuatan militer adalah **Offensive**, karena pertahanan yang paling baik adalah dengan menyerang. Asas tersebut diwujudkan dengan konsep **Strategi Penangkalan**. Sedangkan salah satu asas pertahanan semesta adalah **Tidak Kenal Menyerah**, yang diaplikasikan dalam taktik gerilya.

**15.c.** Penyelenggaraan pertahanan negara kepulauan melihat rangkaian kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah yang utuh. Dengan cara pandang tersebut, ruang pertahanan laut dapat divisualisasikan sebagai kesatuan ruang pertahanan karena secara alamiah lautan yang menghubungkan pulau-pulau besar dan kecil terangkai dalam satu kesatuan. Namun demikian perspektif ini tidak boleh mengingkari kondisi



alamiah wilayah daratan yang berbentuk pulau-pulau besar dan kecil yang “terpisah”. Mengalir dari pemahaman tersebut, konsep pertahanan darat memandang wilayah daratan tidak hanya sebagai “ruang juang”. Wilayah daratan harus dipandang sebagai “ruang juang” sekaligus sebagai “alat juang” dan “kondisi juang”. Pandangan tersebut sejalan dengan sifat kesemestaan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Oleh karena itu ruang pertahanan darat disusun berdasarkan kompartementasi strategis, dimana setiap kompartemen strategis diharapkan mampu melakukan perlawanan berlarut secara mandiri. Setiap wilayah daratan, baik pulau-pulau besar maupun rangkaian pulau-pulau kecil memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dengan demikian pertahanan darat tidak difokuskan pada lima pulau besar dengan konsentrasi kekuatan merata seperti yang disarankan dalam konsep SPML.

## KESIMPULAN

16. Setiap sistem pertahanan negara harus menempatkan aspek ancaman sebagai pertimbangan utama dalam penyusunannya. Hal ini sesuai dengan peran sistem pertahanan negara, yaitu untuk melindungi eksistensi negara dari setiap ancaman. Strategi pertahanan negara merupakan salah satu sub-sistem dari sistem pertahanan negara yang mengatur mekanisme pembangunan, penggunaan dan pengkoordinasian instrumen kekuatan negara untuk mencapai sasaran-sasaran yang akan mendukung terwujudnya keamanan nasional. Mengalir dari a tersebut, para penyusun strategi perlu melakukan prediksi terhadap kemungkinan ancaman yang akan dihadapi dalam rangka menentukan kekuatan serta metode yang tepat untuk menghadapi ancaman tersebut.

17. Faktor geografi merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pertahanan negara karena kegiatan pertahanan negara memerlukan dimensi ruang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun faktor geografi sangat penting, namun para penyusun strategi pertahanan negara, strategi militer, konsep-konsep operasional penggunaan kekuatan militer tidak boleh mengabaikan faktor demografi dan kondisi sosial

yang bersifat dinamis. Sebagai negara kepulauan, kondisi geografis Indonesia terdiri dari beberapa pulau besar dan rangkaian pulau-pulau kecil. Oleh karena itu pengerahan kekuatan militer pada tingkat stragegis, operasional maupun taktis harus mempertimbangkan karakteristik geografis Indonesia berikut faktor demografi dan kondisi sosial yang melingkupinya secara utuh.

18. Penyusunan strategi pertahanan negara, strategi militer, konsep-konsep operasional penggunaan kekuatan militer seyogyanya dikorelasikan dengan tingkat-tingkat perang yang meliputi tingkat strategis, operasional dan taktis. Pemahaman tentang tingkat-tingkat perang yang komprehensif yang dibarengi dengan pemahaman tentang arti penting faktor geografi, demografi dan kondisi sosial diharapkan akan menghasilkan konsep pengerahan kekuatan militer yang tepat tujuan, tepat metode dan tepat sarana dalam dimensi ruang tertentu sesuai dengan karakteristik geografi, demografi dan kondisi sosial dimana pengerahan kekuatan militer diselenggarakan. \*\*\*

### Catatan akhir

<sup>1</sup> Carl von Clausewitz, *On War*, New Jersey, Princeton UP, 1976, hal.96

<sup>2</sup> *National subjugation* adalah penyerahan suatu negara kepada negara lain karena kekalahan militernya, dikutip dari US Government, *Joint Publication*, Virginia 1975

<sup>3</sup> *Ibid* 1) hal. 563

<sup>4</sup> Alleman Bruce, *Warfare and History: Modern Chinese Warfare, 1795-1989*, Routledge, New York 2001, hal.194-217

<sup>5</sup> Ringler Dale, *How the Vietnamese Won the War*, SAMS Monograph, Fort Leavenworth, Kansas 2002, hal. 4-9

<sup>6</sup> *Decisive Point* adalah tempat, kegiatan atau titik-titik kritis dalam suatu sistem atau fungsi yang memungkinkan seorang komandan mengungguli musuh serta berpengaruh besar terhadap hasil operasi, diterjemahkan dari US Army Field Manual, *FM 3-0, Operation*, Washington DC 2002, hal.305

<sup>7</sup> Diterjemahkan secara bebas dari US Army Doctrine, *FM 3-0, Operation*, Washington DC 2001, hal. 2-3

<sup>8</sup> US Joint Chief of Staff, *JP 1-02, Doctrine for Joint Operation*, Washington DC 2001, hal. 358

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 357

<sup>10</sup> COCOM adalah Komando Mandala (*Theater*) Gabungan yang digelar di beberapa penjuru dunia, pembagian wilayah tanggung jawabnya ditentukan oleh Presiden Amerika Serikat sebagai Panglima Tertinggi (Commander in Chief). Sampai saat ini Militer AS menggelar 5 (lima) COCOM yang meliputi (NORTHCOM, SOUTHCOM, PACOM, CENTCOM dan EUCOM)